

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berfokus pada keterlibatan perempuan dalam pengembangan Kampung Tematik Jurang Belimbing, khususnya dalam penerapan Kebijakan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 22 Tahun 2018. Dalam konteks pembangunan masyarakat, perempuan sering menjadi kelompok yang terpinggirkan, meskipun peran mereka sangat vital dalam mendukung keberhasilan program-program pembangunan. Keterlibatan perempuan dalam pengembangan kampung tematik tidak hanya penting untuk menciptakan kesetaraan gender, tetapi juga untuk memberdayakan mereka sebagai agen perubahan dalam komunitas. Dengan melibatkan perempuan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan, diharapkan mereka dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keberlanjutan budaya dan seni yang ada di Jurang Belimbing. Misalnya, melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan seni tradisional seperti ketoprak, karawitan, atau kaligrafi. Perempuan dapat memainkan peran sentral dalam melestarikan warisan budaya yang kaya.

Fokus pada isu tersebut penting karena pada saat ini keterlibatan perempuan dalam proses pengembangan kampung tematik sering dan

terabaikan. Padahal, perempuan memiliki peran strategis yang dapat mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Dalam konteks ini, perspektif gender sangat penting untuk diperhatikan karena ketidaksetaraan gender dapat menghambat partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Pada pembangunan khususnya pada Kampung Tematik, keterlibatan perempuan dalam semakin menjadi perhatian penting, khususnya dalam konteks kebijakan publik. Keterlibatan perempuan dalam pengembangan Kampung Tematik Jurang Belimbing merupakan salah satu aspek krusial untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi perempuan sering menjadi faktor yang diabaikan, padahal mereka memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik Pasal 1 Ayat 13 dikatakan bahwa kampung tematik merupakan suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan yang menunjukkan keaslian diri masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang ditonjolkan dari hasil kesepakatan masyarakat (Novitasari dan Dewi, 2020).

Sebagaimana kajian literatur keterlibatan perempuan merupakan peran yang penting dalam suatu pembangunan. Keterlibatan perempuan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketika perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, hasil pembangunan cenderung lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mendalam perempuan

tentang kebutuhan komunitas, serta kemampuan mereka untuk berinovasi dan menciptakan solusi yang relevan dengan konteks lokal.

Kebijakan dan peraturan dalam menetapkan segala aspek di dalamnya, sering kali perempuan tidak diikutsertakan. Tak hanya itu, peran perempuan dianggap kurang penting untuk segala aspek pembangunan. Dalam memutuskan kesepakatan, perempuan menjadi salah satu kelompok yang terpinggirkan, padahal peran perempuan sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan program-program pembangunan. Permasalahan terkait gender selalu ada dalam setiap aspek kehidupan sosial, salah satunya adalah dalam dunia pemerintahan (Fitriyani dkk., 2022).

Permasalahan kesetaraan gender kini masih menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih terus diperjuangkan. Gender merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman (Audina, 2022). Perempuan sering kali memiliki kesempatan yang lebih kecil dibanding laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam bidang sosial, pendidikan, politik, pembangunan, ekonomi, dan lain sebagainya (Judiasih, 2022). Faktor budaya setempat yang masih menganggap bahwa wanita adalah “konco wingking”, sehingga melemahkan posisinya dalam proses pengambilan keputusan.

Kampung tematik merupakan sebuah konsep pengembangan desa yang berfokus pada tema tertentu, seperti budaya, pertanian, kerajinan, atau

pariwisata. Kampung tematik ini memiliki berbagai tema, tergantung pada potensi pembangunan kampung. Kampung tematik berfokus pada mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara proaktif sehingga mereka tidak hanya berbasis masyarakat tetapi juga menciptakan lingkungan yang unik dan berkelanjutan (Idziak *et al.*, 2015). Pada daerah Jurang Blimbing, Tembalang, Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang masih memiliki budaya dan seni yang cukup kental. Selama ini, di kampung Jurang Blimbing memiliki beberapa kesenian tradisional antara lain, ketoprak, kuda lumping dan karawitan, serta seni kaligrafi (Irhandayaningsih, 2018).

Umumnya, perempuan memiliki peran dalam kontribusi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan secara signifikan terhadap keberlanjutan budaya dan seni yang ada di Jurang Belimbing. Misalnya, melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan seni tradisional seperti ketoprak, karawitan, atau kaligrafi. Secara garis besar, perempuan dapat memainkan peran sentral dalam melestarikan warisan budaya yang dapat mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Keterlibatan perempuan dalam pengembangan kampung tematik tidak hanya penting untuk menciptakan kesetaraan gender, tetapi juga untuk memberdayakan mereka sebagai agen perubahan dalam komunitas. Perempuan berperan dalam pembangunan, seperti membantu mendorong proses pembangunan kampung tematik dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan

berupa terjun langsung dalam kegiatan PKK, posyandu, dan lain sebagainya (Mahsusiyah, 2023).

Sudah sejak lama, banyak pihak telah memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Perspektif gender sangat penting untuk diperhatikan, karena ketidaksetaraan gender dapat menghambat partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Persoalan ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan masih juga dirasakan (Muhartono, 2020). Pada pembangunan Kampung Tematik, keterlibatan perempuan menjadi perhatian penting, khususnya dalam konteks kebijakan publik. Keterlibatan perempuan dalam pengembangan Kampung Tematik Jurang Belimbing merupakan salah satu hal yang krusial untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi perempuan sering menjadi faktor yang diabaikan, padahal mereka memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena kesenjangan ini, pemerintah dipaksa untuk membangun tata pemerintahan yang mempertimbangkan gender dan mendorong pengutamaan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk di sektor politik (Fitriyani dkk., 2022).

Pada Kota Semarang sendiri terdapat kebijakan yang mengatur mengenai pembangunan Kampung Tematik, yaitu Perwali Nomor 22 Tahun 2018. Kebijakan kampung tematik ini dilandasi atas permasalahan penduduk yang berfokus pada penanganan kawasan kumuh dan kemiskinan serta

menanggulangi secara besar permasalahan kepadatan penduduk di wilayah-wilayah kelurahan di Kota Semarang. Pemerintah Semarang berharap dengan adanya kebijakan ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki wilayah kumuh yang terabaikan di kota Semarang. Kampung tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan atau kecamatan yang memiliki potensi sosial dan ekonomi tertentu yang dipilih oleh masyarakatnya. Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik, suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan menunjukkan identitas dan jati diri masyarakatnya melalui potensi lokal yang dipilih dan ditonjolkan melalui persetujuan masyarakat. Sejak tahun 2016, Kota Semarang telah memiliki 250 Kampung Tematik, masing-masing dengan berbagai potensi dan ciri khas (Yusriya dan Kurniati, 2024).

Konsep ini merupakan terobosan kebijakan tata kelola perkotaan yang bertransformasi dari pendekatan fisik semata menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Keberagaman tema yang berkembang, mulai dari Kampung Batik di Rejomulyo, Kampung Pelangi di Randusari, Kampung Wisata Jajan Pasar di Gajahmungkur, hingga Kampung Toga di berbagai lokasi ini mencerminkan kekayaan sosio-kultural Kota Semarang (Faizah, Widowati, & Zarkasyi, 2022; Saputri, 2019). Di antara keragaman ini, kampung tematik bertema seni dan budaya menempati posisi

khusus. Keberadaannya tidak terlepas dari konteks historis Semarang sebagai melting pot Jawa pesisir dan muncul sebagai respons kreatif terhadap ancaman marginalisasi budaya lokal di tengah modernisasi, sekaligus optimalisasi potensi ekonomi kreatif warisan leluhur. Secara filosofis, kampung tematik seni merepresentasikan upaya *rekonsiliasi spasial* antara tradisi dan modernitas, di mana ruang permukiman bertransformasi menjadi galeri hidup (*living gallery*) yang memamerkan proses kreativitas (Sukowati, 2022), selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Karakteristik umum kampung tematik seni di Semarang adalah pola pembinaan kolaboratif antara aktor negara, akademisi, dan masyarakat (model *triple helix*). Selain Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing yang menjadi fokus penelitian ini, terdapat contoh lain seperti Kampung Seni Kaligrafi Al-Qur'an di Bangetayu dan Kampung Seni Rupa di Tlogosari (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang, 2022). Bahkan, seni telah menjadi *cross-cutting element* yang terintegrasi dalam berbagai tema kampung. Sebagai contoh, Kampung Batik Semarang tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga ruang pembelajaran motif dan filosofi yang melibatkan banyak pengrajin perempuan (Disbudpar Kota Semarang, 2023). Sementara itu, Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing mengkhususkan diri pada seni pertunjukan tradisional Jawa seperti ketoprak, kuda lumping, dan karawitan. Keunikan

Jurang Belimbing terletak pada keberlanjutan aktivitas keseniannya yang telah mengakar sejak 1974, jauh sebelum kebijakan kampung tematik dicanangkan, sehingga transformasinya lebih berbasis pada modal budaya organik (Irhandyaningsih, 2018). Kampung ini tidak sekadar menjadi 'panggung' pertunjukan, tetapi berfungsi sebagai sanggar aktif, ruang latihan rutin, dan laboratorium regenerasi bagi seniman muda.

Namun, di balik vitalitas kolaborasi, dan daya tarik seni inilah terselip sebuah paradoks. Dalam konteks pengembangan Kampung Tematik, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam bidang seni telah menjadi elemen krusial. Data menunjukkan kontribusi perempuan sebesar 53,7% dalam sektor ekonomi kreatif nasional dan dominasi 65% sebagai pelaku industri kreatif berbasis seni dan kerajinan (Kemenparekraf 2022; Bekraf 2019). Di Jawa Tengah, fenomena ini terkonfirmasi dengan 58% pengelola atraksi budaya dalam program desa/kampung wisata adalah perempuan, sementara 61,3% berperan dalam pelestarian kesenian tradisional seperti tari, batik, dan kerajinan tangan (Disbudpar Jateng 2022). Situasi di Kampung Tematik Semarang bahkan lebih meyakinkan, dengan 73% kegiatan seni budaya diinisiasi dan dikelola oleh kelompok perempuan, dan khusus di Kampung Batik Semarang, 85% pengrajin dan pelaku seninya adalah perempuan (Disbudpar Kota Semarang 2023; BPS Kota Semarang 2022). Taman Budaya Jawa Tengah juga mencatat bahwa perempuan memegang peran kunci dalam 67% festival seni rakyat di Jawa

Tengah, sementara data Kemendikbud menunjukkan program pemberdayaan perempuan melalui seni telah meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan budaya hingga 47% dalam lima tahun terakhir, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan kohesi sosial masyarakat (Taman Budaya Jateng 2022; Kemendikbud 2023).

Meskipun data tersebut menggambarkan kontribusi perempuan yang dominan, partisipasi mereka sering kali terkonsentrasi pada ranah operasional dan teknis. Perempuan banyak berperan sebagai pelaku seni, pelatih, pengelola logistik, dan penjaga ritme kegiatan harian. Perempuan banyak terlibat pada kegiatan operasional seperti mendekorasi panggung, memasak, dan pemandu wisata jika ada wisatawan ingin melihat kampung tematik. Namun, ketika memasuki ranah strategis seperti perencanaan program jangka panjang, penganggaran, pengambilan keputusan kebijakan di tingkat pengurus, atau negosiasi dengan pihak eksternal, suara dan kehadiran mereka justru melemah (Savitri, 2022). Studi-studi terdahulu mengindikasikan bahwa representasi perempuan dalam struktur pengambilan keputusan formal masih sangat timpang (Pratiwi & Setyowati, 2024). Ketimpangan tersebut berakibat dari adanya budaya patriarki yang masih marak terjadi di lingkungan kampung. Banyak perempuan yang masih terpinggirkan dan pendapat mereka kurang didengar oleh para kaum laki-laki. Dengan adanya budaya tersebut, sehingga perempuan merasa bahwa mereka kurang dihargai saat proses pengambilan

Keputusan. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa partisipasi perempuan masih berada pada tingkat *tokenism* (partisipasi simbolis) dalam tangga partisipasi Arnstein (1969). Ruang seni yang seharusnya bebas dan ekspresif justru kerap terkekang oleh norma sosial patriarkis yang membatasi perempuan pada peran-peran pendukung.

Oleh karena itu, memilih Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing sebagai lokus penelitian bukan semata karena kekayaan dan keunikan seninya, tetapi karena kampung ini merepresentasikan medan kajian yang ideal untuk menguji sejauh mana pembangunan berbasis komunitas dan kebijakan *top-down* seperti Perwali No. 22/2018 dapat menciptakan ruang partisipasi yang benar-benar inklusif dan transformatif bagi perempuan. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik bahwa kehadiran perempuan yang tampak masif di lapangan tidak serta-merta menjamin terpenuhinya keadilan substantif dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, penelitian ini ingin melihat lebih jernih: di balik warna-warni mural, gemerincing gamelan, dan gemulai tarian di Jurang Belimbing, apakah perempuan benar-benar memiliki suara yang menentukan masa depan kampung mereka sendiri, ataukah seni justru terjebak dalam mereproduksi ketimpangan gender yang terselubung di balik gemerlap pertunjukan?

Dalam hal ini, Jurang Belimbing sebagai salah satu kampung tematik yang menerapkan kebijakan ini, menawarkan contoh konkret bagaimana

keterlibatan perempuan dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya dapat menjadi kunci keberhasilan. Untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi perempuan, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong partisipasi yang lebih inklusif. Penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis keterlibatan perempuan di Kampung Tematik Jurang Belimbing dan dampaknya terhadap kebijakan Perwali No. 22 Tahun 2018 dari perspektif gender. Dengan demikian, Kampung Tematik Jurang Belimbing tidak hanya menjadi contoh keberhasilan dalam penerapan kebijakan tersebut, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemberdayaan perempuan dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.

Pentingnya akses yang setara bagi perempuan menjadi fokus utama, mengingat peran mereka yang krusial dalam proses pengembangan komunitas. Di Kampung Jurang Belimbing, kehadiran lurah perempuan menjadi simbol kemajuan dalam kesetaraan gender. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya memiliki suara dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dapat memimpin dan mengelola pembangunan di lingkungan mereka. Lurah perempuan berkontribusi pada kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan, sekaligus menginspirasi perempuan lain untuk aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Pendidikan penting bagi perempuan dilihat cerminan dari dampak positifnya terhadap pengembangan

pribadi, ekonomi, kesejahteraan dan keadilan (Irhandayaningsih, 2018). Kepemimpinan perempuan di Kampung Jurang Belimbing dapat menjadi model bagi pengembangan kampung tematik lainnya.

Pengenalan proses partisipatif terkait perencanaan pembangunan kampung tematik membuka peluang bagi masyarakat disana. Dalam penelitian Andryanto (2021) bahwa perempuan dan kelompok lain yang secara historis terpinggirkan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses partisipatif dalam pembangunan tingkat lokal. Sejauh ini, peran perempuan yang sudah terealisasi di sana adalah keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan bersama, seperti rapat bersama yang menjadikan perempuan disana pendapatnya didengar. Perempuan di kampung tematik telah menjadi aktor penting dalam pentas seni ketoprak. Disana, para perempuan boleh mengikuti pentas seni, seperti tari menari. Kampung tematik sendiri memiliki pemanfaatan lahan untuk UMKM yang berjualan di hari minggu atau kerap disebut Car Free Day (CFD), para perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi UMKM yang berjualan disana.

Tak hanya itu, tokoh yang sangat penting, seperti jabatan lurah disana adalah seorang perempuan. Walaupun, perempuan sudah mulai dihargai pendapatnya dan keberadaannya, akan tetapi tetap mayoritas laki - lakinya masih lebih banyak dalam pengambilan keputusan. Sejalan dengan literatur sebelumnya, Tisnandya dkk., (2021) bahwa setelah Kampung Pelangi

Randusari menjadi lokasi wisata di pusat kota, perempuan mulai membangun usaha rumah tangga dengan membuat souvenir atau kriya yang dapat dijual, membuka toko kelontong, atau menjual makanan dan minuman untuk pengunjung. Ini menunjukkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam ekonomi Kampung Pelangi Randusari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan perempuan dan dampaknya terhadap pengembangan kampung, dengan menyoroti pentingnya akses yang setara sebagai fondasi untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika keterlibatan perempuan dalam konteks kebijakan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan hambatan yang ada, serta merumuskan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memberdayakan perempuan dalam pembangunan kampung tematik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian gender dalam pembangunan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di Jurang Belimbing.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing Kota Semarang?
2. Apa saja tantangan kaum perempuan dalam berpartisipasi di dalam pembangunan kampung tematik?
3. Apa saja program pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan pengadaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi program pemberdayaan perempuan yang mendukung perempuan di Kampung Tematik Jurang Belimbing Kota Semarang.

3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi para perempuan dalam berpartisipasi di dalam pembangunan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan mampu menjadi referensi dan menyumbang ilmu pengetahuan mengenai kajian ilmu pemerintahan khususnya dalam bidang analisis kebijakan dan keterlibatan perempuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi refleksi bagi pemerintah agar dapat melibatkan perempuan dalam pembangunan khususnya pada pembangunan kampung tematik di Kampung Jurang Belimbing.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini yaitu dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi pemerintah, diharapkan mampu menjadi refleksi

dan saran agar dapat menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan dengan baik, serta dapat memberdayakan dan mendengar pendapat dari perempuan. Kemudian bagi masyarakat, diharapkan mampu menjadi sumber rujukan atau referensi dalam rangka memperkaya pengetahuan terkait kebijakan kampung tematik dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi peneliti serta berguna untuk kehidupan sehari-hari.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam bidang penerapan kebijakan Perwali Nomor 22 Tahun 2018. Penelitian Pratama dkk (2024) yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang” didapatkan hasil implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik karena hanya tiga dari delapan kampung tematik yang berjalan. Pada penelitian Marantika (2021) yang berjudul “Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo)” bahwa pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal karena kurangnya kepatuhan implementor terhadap peraturan yang ada. Pada penelitian yang dilakukan Arlan (2017) dengan judul “Implementasi Peraturan

Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin (Studi Kasus di Kelurahan Bitahan)” yang mendapatkan hasil bahwa implementasi belum semuanya terealisasi dengan baik karena sumber daya manusianya kurang baik pada penerapan kebijakan, dan anggaran untuk pengimplementasian kebijakan pun kurang, serta implementor yang kurang baik dalam keberlangsungan kebijakan ini.

Kemudian penelitian ini juga melakukan studi pustaka terhadap penelitian terdahulu dari penelitian yang dilakukan oleh Umi Latifah (2024) berjudul “Partisipasi Perempuan dalam Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim: Studi Kasus Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kelurahan Cempaka Putih Timur RW 03, Jakarta Pusat, Tahun 2022” menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam program berbasis komunitas berjalan efektif ketika didukung oleh kelembagaan yang inklusif, pendekatan *bottom-up*, serta kolaborasi antara pemerintah dan kelompok perempuan. Penelitian ini mengungkap bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam pelaksanaan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi program, yang pada akhirnya meningkatkan keberdayaan dan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, studi oleh Salwa Umiatik Maliyah (2025) dengan judul “Analisis Keterlibatan Kelompok Perempuan dalam Perancangan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kota Semarang” mengkritisi proses pembuatan kebijakan yang justru cenderung mengabaikan partisipasi kelompok perempuan. Meskipun Perda tersebut dimaksudkan untuk melindungi perempuan, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam tahap perumusan kebijakan masih bersifat terbatas dan tidak partisipatif, sehingga mengakibatkan resistensi dari organisasi masyarakat sipil seperti Aliansi Peduli Perempuan. Kedua penelitian ini bersama-sama menggarisbawahi pentingnya ruang partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) bagi perempuan, baik dalam ranah lingkungan maupun politik, sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme keterlibatan perempuan dengan praktik kebijakan di tingkat daerah.

Pengambilan tempat sebagai tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu daerah Jurang Belimbing, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Adapun penelitian sebelumnya, yaitu Novitasari dan Dewi (2019) dengan judul “Analisis Stakeholder dalam Implementasi Kampung Tematik Seni dan Budaya di Kelurahan Tembalang”. Pada penelitian tersebut, hasil yang didapatkan berfokus pada pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018. Pada penelitian lainnya yaitu Afriska Yoga Saputri (2019) dengan judul penelitian “Analisis Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus : Kampung Tematik

Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur)” mendapatkan hasil bahwa karakteristik masyarakat, partisipasi dalam perencanaan, serta pemahaman para aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam Program Kampung Tematik di Kota Semarang sangatlah penting. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan menjadi kunci agar program yang dirancang oleh Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan dalam pembangunan Kampung Tematik memiliki peran yang signifikan dalam mendorong partisipasi masyarakat dan memberdayakan potensi mereka demi kesejahteraan.

Penelitian yang dilakukan Irhandayaningsih, dkk. (2018) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Kampung Jurang Belimbing Sebagai Kampung Seni dan Budaya di Kota Semarang Melalui Pelestarian Seni Tradisional Untuk Menunjang Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan” mendapatkan hasil bahwa pemerintah Kota Semarang telah memberikan perhatian dalam mendukung kampung tematik tersebut yang diharapkan menjadi sarana untuk pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian Irhandayaningsih (2018) berjudul “Kampung Tematik Sebagai Upaya Melestarikan Seni Dan Budaya Daerah di Jurang Blimbing Tembalang Semarang” didapatkan hasil bahwa kampung tematik yang tadinya kumuh kotor menjadi lebih menarik serta pelestarian seni budaya yang dilakukan disana berjalan cukup baik, namun harus diadakan

pembinaan tanpa putus oleh semua elemen masyarakat supaya tidak berhenti di tengah jalan. Sebagaimana kajian literatur sebelumnya, keterlibatan perempuan merupakan peran yang penting dalam suatu pembangunan karena sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Sejalan dengan literatur sebelumnya, Tisnandya, dkk., (2021) keterlibatan perempuan pada sektor perekonomian di Kampung Pelangi Randusari yang dahulunya dikenal sebagai salah satu kawasan kumuh perkotaan dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Para perempuan di sana bekerja secara mandiri berjualan karya seni, makanan dan minuman yang mampu meningkatkan sektor ekonomi di daerah tersebut.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1. Definisi Gender, Partisipasi Perempuan, dan Pemberdayaan Perempuan

1.6.1.1 Gender

Gender berasal dari kata Latin "genus" yang berarti jenis atau tipe. Gender merujuk pada karakteristik, peran, dan tanggung jawab yang ditetapkan secara sosial kepada perempuan dan laki-laki, bukan berdasarkan kodrat alami. Konsep dasar gender merupakan hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia dan masyarakat, serta dapat berubah

sesuai dengan waktu, tempat, dan budaya lokal dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya. Konsep gender terbentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sesuai dengan budaya yang dianut dan dihormati. Konstruksi ini bersifat dinamis, artinya ia bisa berubah seiring waktu, tempat, dan konteks budaya yang berbeda. Misalnya, dalam masyarakat tradisional Jawa, perempuan sering kali diharapkan mengurus urusan rumah tangga seperti memasak dan mengasuh anak, sementara laki-laki bertanggung jawab atas pekerjaan di luar rumah. Namun, di masyarakat urban modern, peran ini semakin fleksibel dan bisa saling tumpang tindih. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara formal oleh psikoanalisis Robert Stoller pada tahun 1968 dalam bukunya "*Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity*", di mana ia membedakan antara identitas biologis dan identitas sosial-budaya, menekankan bahwa gender bukanlah sesuatu yang bawaan, melainkan dipelajari dan dibentuk oleh lingkungan. Perempuan sering diasosiasikan dengan sifat lemah lembut dan halus, sementara laki-laki diasosiasikan dengan sifat perkasa, kuat, dan tangguh.

Pemahaman tentang gender sebagai konstruksi sosial telah dikembangkan oleh para pemikir feminis terkemuka, contohnya seperti Simone de Beauvoir. Dalam karyanya yang ikonik yaitu *The Second Sex* (1949), menyatakan bahwa "*one is not born, but rather becomes, a woman*" yang artinya, perempuan bukanlah dilahirkan dengan peran tertentu, melainkan dibentuk menjadi perempuan melalui proses sosial dan budaya yang sering menempatkan mereka dalam posisi subordinat. Pernyataan ini menjadi fondasi bagi pemikiran feminis modern, yang melihat gender bukan sebagai takdir alamiah, tetapi sebagai hasil dari kekuasaan patriarki yang mendominasi masyarakat. De Beauvoir menyoroti bagaimana masyarakat membangun citra perempuan sebagai "*the Other*" atau yang lain, yang selalu didefinisikan dalam relasi dengan laki-laki sebagai pusat. Dalam konteks pembangunan kampung tematik seperti di Jurang Belimbing, Semarang, pemahaman ini relevan karena perempuan sering kali terlibat dalam kegiatan seni dan budaya, tetapi peran mereka dibatasi oleh norma gender yang menempatkan mereka di belakang layar, bukan sebagai pemimpin atau pengambil keputusan utama.

Mengembangkan ide de Beauvoir, Judith Butler dalam bukunya *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (1990) memperkenalkan konsep "*performativity*" gender, di mana gender bukanlah identitas tetap, melainkan serangkaian tindakan yang diulang-ulang dan diperankan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Butler berargumen bahwa gender terbentuk melalui performa sosial seperti cara berpakaian, berbicara, dan berperilaku yang dianggap "wajar" oleh masyarakat. Konsep ini menantang asumsi bahwa perempuan secara alami lemah lembut (feminitas) sementara laki-laki kuat dan tangguh (maskulinitas), dan menunjukkan bahwa stereotip ini adalah produk budaya yang bisa diubah. Dalam masyarakat Indonesia, di mana budaya patriarki masih kuat, performativitas gender ini terlihat dalam bagaimana perempuan di kampung tematik seni diharapkan untuk "berperan" sebagai pendukung, bukan inovator utama, yang pada akhirnya membatasi partisipasi mereka dalam pembangunan. Sebagai contoh, penelitian di desa-desa Indonesia menunjukkan bahwa norma ini menyebabkan perempuan mengalami konflik peran ganda (dual roles), di mana mereka harus menyeimbangkan tugas domestik dengan kontribusi publik.

Teori gender tidak hanya berhenti pada pemahaman konstruksi sosial, tetapi juga mencakup dimensi kesetaraan dan pemberdayaan. Naila Kabeer, seorang ahli gender dan pembangunan, dalam karyanya *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought* (1994), mendefinisikan pemberdayaan perempuan sebagai proses memperoleh kemampuan untuk membuat pilihan strategis dalam kehidupan, yang melibatkan akses terhadap sumber daya, keagenan, dan pencapaian. Kabeer menekankan bahwa "empowerment is about change, choice, and power," di mana perempuan harus diberi ruang untuk menantang hierarki gender yang ada dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Dalam pembangunan desa atau kampung tematik di Indonesia, teori ini relevan karena partisipasi perempuan sering kali terhambat oleh ketidaksetaraan struktural, seperti rendahnya representasi di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Musrenbang, di mana hanya sekitar 13-18% perempuan yang terlibat secara aktif. Penelitian di Nusa Tenggara Timur, misalnya, menunjukkan bahwa meskipun kebijakan seperti kuota 30% untuk perempuan ada, norma patriarki masih membatasi peran mereka dalam pengambilan keputusan, sebagaimana diungkapkan oleh Mutmainah (2021) bahwa "norma adat membatasi peran

perempuan dalam ruang publik dan menjustifikasi dominasi laki-laki."

Di Indonesia, pendekatan gender ini diterapkan dalam studi tentang pembangunan desa, di mana perempuan dianggap sebagai agen perubahan yang krusial untuk mencapai keadilan, tetapi sering kali terpinggirkan karena beban ganda, yaitu sebagai pekerja rumah tangga dan kontributor ekonomi. Beban ganda perempuan memperkuat eksklusi mereka dari proses-proses politik desa, yang menjadi tantangan utama dalam pemberdayaan. Teori gender menjelaskan peran dan hubungan antara jenis kelamin dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Gender sebagai konstruksi sosial mempengaruhi bagaimana individu berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini menggunakan teori gender untuk menganalisis keterlibatan perempuan (Wahyuni, 2022).

1.6.1.2 Partisipasi Perempuan

Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai proses di mana individu dan kelompok dari komunitas lokal berpartisipasi secara aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini mencakup berbagai tingkat partisipasi, mulai dari informasi hingga pengambilan

keputusan yang lebih kompleks. Secara konseptual, partisipasi masyarakat pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Sherry Arnstein dalam artikel klasiknya tahun 1969 berjudul “*A Ladder of Citizen Participation*”. Arnstein menggambarkan delapan anak tangga partisipasi, mulai dari manipulasi dan terapi (tingkat terendah, non-partisipasi), informasi dan konsultasi (*tokenism*), hingga *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control* (tingkat tertinggi, di mana warga benar-benar memiliki kekuasaan).

Dalam konteks perempuan Indonesia, penelitian lapangan selama dua dekade terakhir secara konsisten menunjukkan bahwa posisi perempuan masih berada di anak tangga bawah hingga tengah, sering hanya diundang untuk “mengisi kursi” dalam Musrenbang atau menjadi tenaga pelaksana kegiatan swadaya, tanpa memiliki kuasa nyata atas anggaran atau keputusan strategis (Rahayu & Wirutomo, 2021). Kerangka Arnstein ini kemudian diperkaya oleh para ahli yang lebih fokus pada isu gender. Andrea Cornwall (2016) mengkritik model Arnstein karena terlalu linier dan mengusulkan tipologi yang lebih sensitif terhadap konteks kekuasaan dan relasi gender. Menurut Cornwall, partisipasi

perempuan sering bersifat instrumental dan hanya dimanfaatkan untuk mencapai tujuan proyek daripada *transformative* (mengubah relasi kuasa yang tidak setara). Dalam banyak program pembangunan desa atau kampung tematik di Indonesia, perempuan memang “diundang” karena ada persyaratan kuota 30% dalam Musrenbang yang diatur di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014, tetapi kehadiran itu lebih bersifat nominal, maksudnya adalah mereka datang, mendengar, mengangguk, lalu pulang mengurus rumah tangga, dan tanpa pernah benar-benar mengubah agenda pembangunan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan praktis dan strategis gender (Savitri, 2022).

Dalam penelitian terbaru, Pratiwi dan Setyowati (2024) meneliti tiga kampung tematik di Yogyakarta dan Semarang. Mereka menemukan bahwa, meskipun perempuan aktif terlibat dalam aktivitas ekonomi kreatif, seperti membuat mural, membuat batik ramah lingkungan, dan mengelola *homestay*, hanya 12% yang pernah terlibat dalam tahap perencanaan dan kurang dari 5% yang memiliki akses langsung ke dana desa atau kampung. Ada kemungkinan bahwa partisipasi perempuan masih bersifat mekanis, dengan kehadiran fisik mereka digunakan untuk memenuhi indikator proyek, tetapi suara dan

kepentingan mereka tidak pernah menjadi prioritas utama. Temuan serupa juga muncul dalam penelitian Rahayu dkk. (2023) di Kampung Wisata Tematik Jawa Tengah, di mana perempuan yang menjadi ketua kelompok PKK atau dasawisma justru merasa “dipaksa” hadir dalam setiap kegiatan tanpa diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi yang berbeda dari versi resmi pemerintah kota.

Dalam konteks Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing sendiri, beberapa laporan evaluasi program Kota Semarang (2022-2025) menunjukkan pola yang mirip. Perempuan memang menjadi motor utama kegiatan seni jalanan, mural, dan pengelolaan warung wisata, tetapi keputusan tentang tema seni tahunan, alokasi dana kelurahan untuk promosi, atau kerja sama dengan investor masih sepenuhnya di tangan laki-laki. Hal ini mengonfirmasi argumen Cornwall (2016) bahwa “*invited participation*” (partisipasi yang diundang dari atas) sering kali justru memperkuat ketidaksetaraan, karena perempuan hanya diberi ruang yang sudah ditentukan sebelumnya, bukan ruang untuk mendefinisikan ulang agenda pembangunan. Teori ini penting pada konteks Kampung Tematik karena dapat meningkatkan rasa kepemilikan

masyarakat, dalam artian saat mereka ikut turut serta membangun kampungnya agar lebih baik dan bisa bermanfaat bagi mereka. Keterlibatan masyarakat juga penting karena dapat menganalisis kebutuhan apa saja yang akan digunakan masyarakat dalam pembangunan Kampung Tematik.

Oleh karena itu, partisipasi perempuan yang transformatif harus memenuhi setidaknya tiga syarat utama yang dirumuskan oleh para ahli kontemporer (Savitri dkk., 2022; Widyaningrum, 2025):

1. Kehadiran yang bermakna (*meaningful presence*), bukan sekadar jumlah, tapi kemampuan untuk berbicara dan didengar.
2. Akses terhadap informasi dan sumber daya, termasuk pelatihan, dana bergulir, dan teknologi digital untuk promosi produk kreatif.
3. Mekanisme akuntabilitas gender, seperti gender budget statement dalam RPJM Desa/Kampung atau kuota nyata di Badan Musyawarah Kelurahan yang memiliki hak veto.

Tanpa ketiga syarat ini, partisipasi perempuan akan tetap menjadi “dekorasi demokrasi pembangunan” belaka, sebagaimana yang sering dikritik oleh para feminis Indonesia

sejak era reformasi hingga kini. Teori ini menjelaskan bagaimana keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan dapat memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan keberhasilan program-program pembangunan. Dari teori tersebut dapat dilihat bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kampung Tematik.

Perempuan dalam suatu pembangunan ataupun pengelolaan suatu wilayah biasanya kurang terlibat. Hal itu dipicu oleh beberapa faktor seperti kurangnya antusiasme, kurangnya sosialisasi, hingga adanya patriarki dari masyarakat. Hal tersebut membuat para perempuan jarang tertarik untuk ikut andil dalam suatu pembangunan. Pada teori keterlibatan perempuan ini bisa didefinisikan sebagai keikutsertaan atau partisipasi dari para perempuan untuk melakukan pengelolaan atau pengembangan suatu wilayah seperti pada Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing. Teori ini akan menjelaskan bagaimana keterlibatan perempuan dalam pengambilan Keputusan maupun dalam proses pengembangan kampung tematik untuk tujuan pemberdayaan perempuan.

1.6.1.3 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan secara etimologis, berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Konsep pemberdayaan dapat dipahami sebagai usaha untuk memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan dari individu atau kelompok yang memiliki daya kepada mereka yang tidak atau belum memilikinya (Sulistiyani, 2004). Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan potensi dan peran perempuan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dapat memperkuat dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan mereka.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Kemen PP) juga menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memberikan akses dan kontrol kepada perempuan terhadap sumber daya di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga mereka dapat mengatur diri sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri. Dengan demikian, perempuan dapat membangun kemampuan dan keyakinan diri serta berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaikan berbagai masalah. Teori pemberdayaan perempuan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki posisi, peran,

dan hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Pendekatan ini menekankan pada proses pemberian kekuatan kepada perempuan. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui bantuan ekonomi, pelatihan keterampilan, atau pengembangan modal sosial. Dengan memberdayakan perempuan, kita juga berupaya untuk menegakkan kesetaraan gender, yang pada gilirannya akan menghasilkan lebih banyak perempuan yang terampil dan ahli di berbagai bidang.

Pemberdayaan dalam konteks ini yaitu melatih keterampilan para perempuan terutama pada bidang seni. Pada Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing terdapat banyak kegiatan yang dapat melatih dan meningkatkan keterampilan perempuan dalam bidang seni tradisional Jawa. Kegiatan tersebut yaitu seperti pelatihan serta pertunjukkan ketoprak, seni kuda lumping, dan seni tari. Secara tidak langsung kegiatan tersebut dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam keterampilannya dan melestarikan budaya. Selain pemberdayaan seni juga terdapat pemberdayaan ekonomi, hal tersebut bisa dilihat dari kegiatan CFD UMKM di kampung

tematik setiap hari minggu yang dapat melatih para perempuan untuk meningkatkan ekonomi dan taraf hidup mereka.

Diadakannya program pemberdayaan perempuan, terutama di bidang seni pada Kampung Tematik Jurang Belimbing diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipan perempuan dalam pembangunan kampung tematik serta meningkatkan keterampilan dan mengasah bakat para perempuan di bidang seni tradisional. Pemberdayaan juga dapat meningkatkan potensi mereka di bidang strategis sehingga dapat mengambil suatu keputusan yang akan dibuat untuk perkembangan kampung tematik. Contohnya dengan adanya pelatihan kepemimpinan. Dengan adanya pelatihan kepemimpinan dan pelatihan pemecahan masalah dapat meningkatkan rasa percaya diri para perempuan dan jiwa kepemimpinan perempuan sehingga mereka dapat berfikir lebih dalam untuk memecahkan suatu masalah terutama untuk kegiatan kampung. Semua pelatihan yang telah disebutkan di atas jika dijalankan, maka akan banyak perempuan yang dapat lebih berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan keberlanjutan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing.

Menurut Zakiyah (2010), pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan membongkar mitos tradisional yang menempatkan perempuan sebagai subordinat, memberikan pendidikan dan keterampilan, serta memotivasi mereka untuk aktif dalam berbagai sektor ekonomi dan sosial. Indikator pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari:

1. Akses Pendidikan: Tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan formal dan nonformal.
2. Kemandirian Ekonomi: Kemampuan perempuan untuk memiliki dan mengelola sumber daya ekonomi, seperti akses ke pekerjaan, kewirausahaan, dan keuangan mikro.
3. Partisipasi Politik dan Sosial: Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat, baik dalam keluarga maupun komunitas.
4. Kesetaraan Gender: Adanya pengakuan terhadap hak dan posisi perempuan yang setara dengan laki-laki di berbagai bidang kehidupan.
5. Pengurangan Kekerasan Gender: Tingkat perlindungan perempuan dari kekerasan domestik, seksual, dan diskriminasi berbasis gender Pendekatan ini berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan

adil, di mana perempuan dapat berperan aktif dan diakui setara.

1.6.2. Tantangan Partisipasi Perempuan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan kampung tematik tidak bisa disederhanakan sebagai “kehadiran” atau “keterlibatan fisik” semata. Ia adalah proses politik yang kompleks, yang menyangkut hak, kekuasaan, dan pengakuan atas suara perempuan sebagai subjek pembangunan. Salah satu kerangka teori yang hingga kini masih sangat sering digunakan untuk memahami makna partisipasi adalah “Tangga Partisipasi Warga” (*A Ladder of Citizen Participation*) yang dikemukakan Sherry R. Arnstein pada tahun 1969. Arnstein menggambarkan delapan anak tangga partisipasi, mulai dari tingkat terendah, yaitu manipulasi dan terapi (*non-participation*), kemudian informasi, konsultasi, dan *placation (tokenism)*, hingga anak tangga tertinggi berupa *partnership*, *delegated power*, dan *citizen power*. Partisipasi yang sejati baru tercapai ketika perempuan memiliki kekuasaan nyata untuk menentukan hasil akhir dari suatu program pembangunan, bukan sekadar menjadi objek atau penerima manfaat pasif (Arnstein, 1969).

Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam pembangunan kampung atau desa masih berada di anak tangga yang paling bawah hingga tengah. Mereka sering hanya diberi informasi, diajak konsultasi, atau bahkan hanya diminta datang untuk “menggenapkan forum” dalam musyawarah, tanpa memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan akhir. Hal ini membuat partisipasi perempuan bersifat simbolik atau mekanistik, bukan substantif. Dalam konteks kampung tematik seni seperti Jurang Belimbing, di mana kreativitas dan ekspresi budaya menjadi motor utama pembangunan, rendahnya tingkat partisipasi perempuan pada anak tangga tertinggi berarti potensi ide, estetika, dan narasi perempuan tentang kampungnya sendiri banyak yang hilang atau tersisihkan.

Di dalam proses partisipasi ini pastinya tidak lepas dari berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dan keberlanjutannya. Tantangan tersebut yaitu adanya kurangnya minat dan dukungan untuk para perempuan agar berpartisipasi dalam pengembangan kampung tematik. Para perempuan di Jurang Belimbing kebanyakan memiliki posisi yang konvensional dalam konteks masyarakat Jawa. Dalam banyak keluarga, perempuan sering dipandang sebagai individu yang bergantung pada laki-laki. Akibatnya, perempuan jarang memperoleh kesempatan untuk membuat keputusan secara mandiri (Mujiarto et al.,

2022). Stereotip gender juga menjadi alasan yang cukup kuat sebagai tantangan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Biasanya perempuan dianggap lemah dan hanya bisa mengurus rumah dan anak yang membatasi mereka untuk terlibat dalam kegiatan yang lainnya. Tekanan sosial ini lah yang membuat perempuan banyak yang tidak percaya diri untuk memulai atau mengembangkan usaha. Tantangan lain dalam partisipasi perempuan adalah kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Banyak perempuan yang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang tinggi. Padahal dengan adanya pendidikan yang mumpuni, mereka dapat mengasah dan menggali potensi di dalam dirinya untuk terus berkembang.

Lebih jauh lagi, konsep partisipasi tidak dapat dipisahkan dari konsep pemberdayaan (*empowerment*). Naila Kabeer, salah satu pemikir gender dan pembangunan paling berpengaruh pada era kontemporer, mendefinisikan pemberdayaan sebagai “*The expansion in people’s ability to make strategic life choices in a context where this ability was previously denied to them*” (Kabeer, 1999). Ia menguraikan bahwa proses pemberdayaan memiliki tiga dimensi yang saling terkait:

1. *Resources* (sumber daya), artinya baik pra-kondisi material (pendapatan, tanah, kredit) maupun non-material (pendidikan, informasi, jaringan sosial);
2. *Agency* (keagenan), Adalah kemampuan untuk mendefinisikan tujuan sendiri dan bertindak untuk mencapainya, termasuk kekuatan kolektif;
3. *Achievements* (pencapaian), dalam hal ini artinya hasil nyata berupa kesejahteraan yang dirasakan.

Menurut Kabeer (2005), ketiga dimensi ini harus berjalan secara bersamaan. Jika salah satu dimensi lemah, pemberdayaan tidak akan pernah utuh. Dalam realitas perempuan Indonesia pedesaan atau perkampungan, akses terhadap *resources* sering kali terhambat oleh norma patriarki, hukum adat, atau kebijakan yang bias gender. Akibatnya, *agency* perempuan menjadi terbatas, mereka mungkin memiliki keinginan untuk berpartisipasi, tetapi tidak memiliki alat, ruang, atau legitimasi untuk melakukannya. Tanpa *agency* yang kuat, *achievements* seperti peningkatan kesejahteraan keluarga, pengakuan sosial, atau perubahan kebijakan sulit tercapai. Kabeer menegaskan bahwa “*empowerment is not something that can be done to or for women; it is something that women themselves must do*” (Kabeer, 2001

dalam Moser & Moser, 2005). Pernyataan ini menjadi sangat relevan ketika kita mengamati program-program kampung tematik yang sering dirancang dari atas (*top-down*) oleh pemerintah kota atau dinas terkait, sehingga perempuan hanya menjadi pelaksana, bukan perancang utama.

Di Indonesia, semangat inklusi gender dalam pembangunan desa atau kampung sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 67 yang menyebutkan bahwa pembangunan desa harus memperhatikan pemberdayaan perempuan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang mewajibkan adanya kuota minimal 30 % perempuan dalam Musrenbang Desa. Namun, seperti yang sering diungkapkan dalam literatur, “ada urang yang sangat lebar antara kebijakan di atas kertas dengan praktik di lapangan” (Savirani & Aspinall, 2017). Penelitian lapangan secara konsisten menunjukkan bahwa meskipun perempuan hadir dalam jumlah besar di tingkat pelaksanaan (misalnya membuat mural, mengelola *homestay*, atau menjual produk kreatif), mereka jarang terlibat dalam tahap perencanaan strategis, penganggaran, atau evaluasi dampak program. Kondisi ini mempertegas argumen Arnstein bahwa partisipasi perempuan masih berada pada level *tokenism*, dan argumen Kabeer

bahwa tanpa perubahan struktural pada ketiga dimensi pemberdayaan, partisipasi perempuan akan tetap dangkal dan tidak berkelanjutan.

Tantangan partisipasi perempuan dalam pembangunan kampung tematik juga dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu struktural, sosial-budaya, dan ekonomi. Setiap kelompok ini saling terkait, menciptakan lingkaran setan yang memperlemah peran perempuan sebagai agen perubahan. Mari kita bahas secara bertahap, dengan merujuk pada temuan dari berbagai studi empiris di Indonesia.

Pertama, tantangan struktural muncul dari kurangnya representasi perempuan dalam struktur pemerintahan desa atau kampung. Di banyak kampung tematik, termasuk yang berbasis seni dan budaya, posisi kepemimpinan seperti kepala desa atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih didominasi oleh laki-laki, yang menyebabkan agenda pembangunan cenderung mengabaikan perspektif perempuan. Meskipun ada fasilitas seperti kotak pengaduan di tingkat RT/RW, partisipasi perempuan dalam evaluasi dan pemantauan pembangunan hampir nol karena tidak adanya perwakilan formal mereka di tingkat pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan temuan Andika et al. (2024) di Kabupaten Kerinci, di mana perempuan kepala desa harus berjuang melawan resistensi aparat desa yang

didominasi laki-laki, yang sering meragukan kemampuan mereka dalam mengelola program pembangunan. Struktur ini, yang berakar pada sistem birokrasi patriarki, membuat perempuan sulit naik ke tingkatan atas tangga partisipasi Arnstein, di mana mereka bisa berbagi kekuasaan secara setara.

Kedua, tantangan sosial-budaya sering kali berasal dari norma patriarki yang melekat kuat di masyarakat pedesaan Indonesia. Budaya ini menempatkan perempuan dalam peran domestik utama, seperti mengurus rumah tangga dan anak, sehingga membatasi waktu dan ruang mereka untuk terlibat dalam kegiatan publik seperti perencanaan kampung tematik. Penelitian oleh Sari (2023) tentang transformasi peran perempuan desa menunjukkan bahwa nilai patriarki masih membelenggu perempuan dalam aspek pengambilan keputusan, di mana suara mereka dianggap kurang berbobot dibandingkan laki-laki, bahkan dalam program yang seharusnya inklusif seperti pengembangan wisata seni. Selain itu, kesadaran politik dan pengetahuan perempuan tentang hak partisipasi masih rendah, sebagaimana diungkapkan dalam studi tentang Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) di mana budaya patriarki menjadi penghalang utama bagi keterlibatan perempuan. Norma gender seperti ini menghambat dimensi keagenan, di mana perempuan merasa tidak berwenang untuk menantang status *quo*,

sehingga partisipasi mereka terbatas pada peran instrumental seperti tenaga kerja sukarela tanpa pengaruh atas hasil akhir.

Ketiga, tantangan ekonomi menambah beban ganda yang dihadapi perempuan, di mana mereka harus menyeimbangkan pekerjaan rumah tangga dengan kontribusi ekonomi keluarga, sambil berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan melalui koperasi di pedesaan Indonesia menemukan bahwa kurangnya akses terhadap sumber daya finansial membuat perempuan terpinggirkan dalam inisiatif ekonomi kreatif, seperti pengembangan seni di kampung tematik. Beban ganda ini juga menimbulkan tekanan psikologis, di mana perempuan merasa tertekan antara ekspektasi keluarga dan tuntutan publik (Pratiwi, 2025).

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini tidak hanya menghambat partisipasi perempuan, tetapi juga melemahkan efektivitas pembangunan kampung tematik secara keseluruhan. Sebagaimana ditegaskan oleh Kabeer, bahwa pemberdayaan adalah proses yang berlangsung lama yang memerlukan intervensi struktural untuk mengubah ketidaksetaraan fundamental. Pemahaman ini sangat penting di Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing untuk membuat strategi yang lebih inklusif, seperti pelatihan *gender-sensitive* dan pembagian kuota perempuan dalam Musrenbang. Dengan mengatasi tantangan ini,

partisipasi perempuan dapat berubah dari sekadar berpartisipasi secara pasif menjadi kekuatan yang mendorong pemberdayaan berkelanjutan. Oleh karena itu, memahami kesulitan yang berkaitan dengan partisipasi perempuan membutuhkan pemahaman tentang bagaimana kekuatan dan kekuasaan didistribusikan dalam masyarakat patriarki, bagaimana norma gender mempengaruhi akses ke sumber daya, dan bagaimana kebijakan yang tampaknya progresif kadang-kadang tidak menjadi praktik yang benar-benar memberdayakan.

1.7 Operasional Konsep

Jurang Blimbing ini diakui sebagai salah satu kampung tematik yang efektif dalam menangani berbagai isu yang muncul di dalamnya. Kampung tematik yang terletak di kawasan mobilisasi masyarakat Kecamatan Tembalang, infrastruktur yang ada di dalamnya ini turut mendukung kelancaran aktivitas mobilitas ekonomi. Selain itu, Kampung Jurang Blimbing terpilih sebagai salah satu kampung yang dinobatkan Pemerintah Kota Semarang sebagai Kampung Tematik Seni dan Budaya. Meskipun demikian, masih terdapat pertanyaan mengenai dampak dan tantangan pemberdayaan ekonomi perempuan pada kampung tematik ini. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi mengenai berbagai tantangan dan dampak, serta solusi yang dihadapi oleh Kampung Jurang Blimbing dalam upaya memberdayakan perempuan, termasuk aspek

ekonomi, partisipasi, transparansi, dan sumber daya sehingga dapat meningkatkan pencapaian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui premis ini, penelitian ini akan secara khusus menganalisis:

1. Penelitian ini akan menganalisis partisipasi perempuan dalam proses pembangunan kampung tematik, dengan fokus pada:

- a. Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan Kampung Tematik

Dengan menilai sejauh mana partisipasi perempuan dan keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan dan dalam pengambilan keputusan di kampung tematik.

- b. Persepsi terhadap Kesetaraan Perempuan

Menganalisis persepsi masyarakat dalam menilai sejauh mana hak-hak perempuan diakui dan dihormati dalam keterlibatannya pada pembangunan kampung tematik.

- c. Dampak Keterlibatan Perempuan

Mengamati dampak keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial, budaya, serta ekonomi dapat mempengaruhi dinamika komunitas serta meningkatkan kesejahteraan perempuan.

2. Penelitian ini akan meneliti berbagai inisiatif yang dilakukan untuk memberdayakan perempuan di Kampung Jurang Belimbing, termasuk:

a. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan

Mengidentifikasi program-program yang memberikan akses kepada perempuan terhadap pelatihan keterampilan dan modal usaha.

b. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan

Menganalisis peran pemerintah setempat dalam menunjang pemberdayaan perempuan di Kampung Tematik.

c. Peningkatan Keterampilan Perempuan

Menganalisis apakah dampak program pemberdayaan yang ada telah berhasil meningkatkan keterampilan dan pendapatan perempuan.

3. Tantangan Partisipasi Perempuan

a. Tantangan Sosial Budaya

Mengamati tantangan sosial budaya dari perempuan dalam berpartisipasi di Kampung Tematik.

b. Tantangan Sumber Daya dan Kelembagaan

Mengamati tantangan sumber daya dan dukungan kelembagaan untuk perempuan dalam berpartisipasi.

1.8 Argumen Penelitian

Penulis berargumen bahwa partisipasi dan keterlibatan perempuan di kampung tematik kekurangan partisipan karena adanya budaya patriarki dan

kurangnya dukungan baik dari sumber daya maupun dari masyarakat yang terlibat. Padahal dengan adanya keterlibatan perempuan dalam pengembangan kampung tematik tersebut dapat menjadi tonggak penegakkan kesetaraan gender terutama di bidang pengembangan kampung dan peningkatan ekonomi keluarga. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan perempuan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender sehingga dapat meningkatkan peran perempuan perempuan di ruang publik dan mengakhiri stereotip buruk tentang perempuan yang lemah dan menghilangkan budaya patriarki di lingkungan masyarakat.

Pemberdayaan dan pelatihan perempuan dapat menjadi pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan. Hal tersebut juga dapat meningkatkan antusiasme perempuan untuk terlibat dalam pengembangan kampung tematik. Pada bidang ekonomi juga perempuan dapat ikut berdagang agar meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup keluarganya. Pemberdayaan tersebut juga mendukung hak-hak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam perkembangan kampung tematik di Jurang Belimbing. Dengan menggunakan perspektif gender juga dapat mendorong keterlibatan perempuan sehingga dapat mendukung faktor-faktor lain, seperti faktor sosial, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Dengan demikian, hal tersebut dapat membuat para perempuan berkenan untuk terlibat aktif di tatanan kehidupan

bermasyarakat yang sebelumnya kebanyakan hanya diduduki oleh para laki-laki saja.

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif karena dinilai sesuai untuk memahami secara dalam penelitian. Metode penelitian yang diterapkan dalam analisis data adalah metode kualitatif yang dikombinasikan dengan teori kepustakaan. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis, disertai dengan pendekatan studi literatur untuk mengumpulkan informasi mengenai keterlibatan perempuan di Kampung Tematik.

Pada Creswell (2007) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang diakhiri dengan narasi analisis data yang mampu menjelaskan tentang prosesnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ditempatkan pada posisi informan, peneliti berinteraksi secara berkelanjutan untuk menggali informasi dan melihat perspektif informan yang kemudian dijelaskan dengan asumsi-asumsi kualitatif. Pengasumsian tersebut menjadi awal dalam penelitian

kualitatif yang akan didukung oleh kerangka teoritis yang akan mempengaruhi permasalahan dalam penelitian dan memiliki keterkaitan akan pemaknaan individu terhadap permasalahan sosial tersebut.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Peneliti memilih pendekatan tersebut didasari oleh studi kasus telah menjadi strategi kualitatif yang mampu membantu peneliti untuk melihat suatu proses, aktivitas, serta kejadian, maupun interaksi individu pada lokasi penelitian secara mendalam. Peneliti akan melaksanakan pengumpulan data dan informasi secara mendetail dengan beberapa prosedur pengumpulan data dalam periode tertentu (Cresswell, 2007).

1.9.2 Situs Penelitian

Peneliti mengambil studi kasus di Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing yang berlokasi di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Alasan memilih Lokasi ini karena Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing merupakan salah satu kampung tematik yang aktif dan menarik banyak individu untuk berkunjung. Kampung tematik tersebut juga dianggap sebagai kampung tematik yang cukup baik dalam perkembangan dan pemberdayaan masyarakatnya. Sebagai

salah satu kampung yang berada di wilayah mobilisasi masyarakat yang tinggi, kampung tematik tersebut pastinya akan menjadi daya Tarik yang baik untuk masyarakat. Kampung tematik tersebut juga berdampak bagi Kecamatan Tembalang karena menjadi salah satu simbol *iconic* yang menjadi kebanggaan kecamatan, khususnya di wilayah Kelurahan Tembalang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para perempuan yang terlibat dalam pengembangan dan proses keberjalan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing dan instansi ataupun pihak yang berwenang atas pengembangan kampung tematik tersebut. Dalam konteks ini, partisipan atau informan diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling dengan melihat keterlibatannya pada pengembangan atau pun proses pengelolaan kampung tematik. Pertimbangan lainnya adalah kompetensi dan pemahaman individu tersebut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti juga akan memilih pemerintah setempat seperti pihak kelurahan maupun lembaga swadaya setempat yaitu (LPMK) yang memiliki keterlibatan dalam pengembangan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing untuk memperkuat serta menambah informasi penelitian.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Dari tujuan penelitian yang berusaha untuk menganalisis keterlibatan perempuan dalam pengembangan Kampung Tematik Jurang Belimbing serta menganalisis dampak keterlibatan perempuan dalam pengembangan kampung tematik tersebut, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan jenis penelitian tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa jenis penelitian deskriptif dilihat mampu memberikan gambaran yang sebenarnya terkait keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan pengembangan kampung tematik di Jurang Belimbing. Penelitian ini menjadikan Kampung Tematik Seni di Jurang Belimbing sebagai objek penelitian dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam proses pengembangan dan keberjalanan pengelolaan kampung tematik sehingga penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai partisipas dan keterlibatan perempuan dalam pengembangan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing tersebut.

Adapun sumber data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara secara mendalam terhadap informan yang telah ditentukan di dalam subjek penelitian untuk ditanyakan digali atas informasinya mengenai keterlibatan perempuan dalam proses pengembangan dan pengelolaan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara telah disusun dengan berdasarkan pada pedoman-pedoman. Selain itu, sumber data juga didapatkan dari hasil observasi peneliti di Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing. Observasi tersebut juga akan dilakukan secara berkala dalam periode tertentu untuk melihat sampai mana keterlibatan perempuan dan dampaknya dalam pengembangan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui dokumentasi dari proses pengelolaan kampung tematik. Data ini melalui dokumentasi saat melakukan observasi pada Lokasi penelitian,

melihat bagaimana partisipasi dan keterlibatan perempuan secara langsung dalam pengembangan kampung tematik. Selain itu, data ini juga didapatkan melalui literatur-literatur lain, seperti penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku, maupun sumber internet lain yang relevan dengan penelitian.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada literatur yang telah dilakukan Cresswell (2007) mengatakan bahwa langkah-langkah dalam mengumpulkan data yaitu meliputi usaha pembatasan penelitian, mengolektifkan informasi dengan wawancara dan observasi secara terstruktur maupun tidak dan melakukan usaha dalam mendokumentasikan atau mencatat terhadap hasil informasi yang didapatkan. Adapun teknik yang digunakan untuk mengolektifkan data dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang relevan dengan penelitian ini. Observasi merupakan proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Peneliti mengobservasi dan melakukan pengamatan pada partisipasi perempuan dalam pengelolaan dan pengembangan kampung tematik. Pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur sesuai pedoman. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik

perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti bagaimana keterlibatan perempuan dalam proses pengembangan kampung tematik. Melakukan observasi juga dapat membantu peneliti melihat kondisi lapangan secara nyata. Sehingga hasil yang didapatkan juga akan sangat relevan dan realistis dengan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Wawancara Mendalam (*in depth interview*)

In depth interview atau wawancara mendalam adalah salah satu metode wawancara yang dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan informan yang memenuhi kriteria kebutuhan untuk penelitian agar mendapatkan informasi dan data yang sesuai. Wawancara mendalam dinilai dapat membantu peneliti untuk mendapatkan rincian informasi yang lebih terperinci. Metode ini juga dapat mengembangkan dan mendekatkan hubungan agar mampu menciptakan kenyamanan bagi informan sebelum mengajukan pertanyaan dan agar informan mengungkapkan detail informasi yang dibutuhkan.

Menurut literatur yang telah dilakukan peneliti, metode ini dapat menjadi analisis pendukung bagi peneliti untuk melihat perilaku informan sehingga membantu peneliti dalam memahami konsep penelitian secara menyeluruh (Mazaya, 2023). Dalam konteks ini,

wawancara dilakukan kepada perempuan yang berada di lingkungan Jurang Belimbing terkhususnya yang terlibat dalam proses pengembangan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing dan kepada *stakeholders* yang terlibat dalam proses pengelolaan kampung tematik tersebut. Pemilihan informan ini didasarkan pada alasan partisipasi, keterlibatan, kemampuan, dan pengetahuan mereka terhadap proses pengembangan dan pengelolaan kampung tematik.

Penelitian ini melibatkan beberapa informan kunci yang dipilih berdasarkan kedalaman pengetahuan dan tingkat keterlibatannya dalam pengelolaan kampung tematik. Informan tersebut yaitu Supriyanto, yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Kampung Tematik dan Ketua Sanggar Kuda Lumping, memberikan perspektif dari sisi pengelola dan pelaku seni. Karna'an, yang menjabat sebagai Ketua LPMK Kelurahan Tembalang dan Penasihat Kelompok Pokdarwis Jurang Belimbing. Slamet Suwadi, selaku Ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), menyoroti aspek kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat. Gimin, selaku ketua Sanggar Ketoprak Sri Mulyo. Dari kalangan perempuan yang aktif, Rizkyana Mega yang berprofesi sebagai Guru Tari di Sanggar Sekar Arum memberikan *insight* mengenai partisipasi perempuan di

bidang seni. Andiena Cahya, selaku seniman perempuan muda di Kampung Tematik. Dwi, selaku pemilik Sanggar Tari Sekar Arum, menyumbangkan pandangannya sebagai pelaku usaha seni sekaligus anggota masyarakat. Kispanti, yang menjabat sebagai Ketua PKK RW 04, mewakili suara perempuan dalam struktur sosial kemasyarakatan. Terakhir, Arum Sartikasari, yang bertindak sebagai Bendahara Pokdarwis, memberikan gambaran mengenai keterlibatan perempuan dalam aspek keuangan dan administrasi kelompok. Keberagaman peran dan latar belakang informan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan multi-perspektif mengenai dinamika partisipasi dan pemberdayaan perempuan di kampung tematik ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi membantu peneliti untuk melakukan penelitian dan analisis data. Metode ini yaitu berupa mendokumentasikan data sehingga proses mendapatkan data dapat lebih transparan dan dapat dimengerti. Dokumentasi juga memudahkan pembaca untuk memahami data-data yang diperoleh selama penelitian. Dokumentasi bisa berupa foto ataupun catatan harian selama melakukan penelitian di lapangan. Dalam konteks ini, dokumentasi yang dimaksud adalah kegiatan dari kampung tematik, baik yang

terdapat partisipasi dan keterlibatan perempuan di dalamnya maupun tidak. Dokumentasi tersebut juga berupa dokumen yang bersifat publik seperti dari internet, buku, maupun jurnal. Adapun dokumen privat yang bersumber dari instansi maupun Lembaga terkait seperti arsip dari Pemerintah Kelurahan Tembalang dan *stakeholders* terkait perancangan, pengembangan, dan pelaksanaan kegiatan di Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemberdayaan kampung tematik akan dilihat kesesuaiannya dengan regulasi dan kondisi idealnya. Selain itu, dokumentasi dalam proses wawancara mendalam juga diwujudkan dalam catatan harian, foto, video, transkrip wawancara, serta audio visual yang merupakan hasil perekaman selama proses wawancara berjalan.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Cresswell (2007), dalam penelitian kualitatif, analisis data diidentifikasi sebagai usaha untuk memaknai data baik berupa tulisan maupun visual oleh peneliti secara menyeluruh. Pada penelitian kualitatif perolehan data dapat dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, maupun observasi secara langsung. Data yang didapatkan kemudian dikolektifkan untuk mendapatkan hasil temuan yang menjadi kunci di dalam penelitian. Cresswell (2007)

juga menjelaskan langkah-langkah menganalisis data kualitatif yaitu dengan menyusun data ke dalam beberapa bentuk, membaca dan memahami dengan seksama set data agar seluruh informasi didapatkan dengan detail, mengidentifikasikan kategori yang bersifat umum yang kemudian akan diklasifikasikan, dan yang terakhir menyatukan atau mengintegrasikan dan mengemas data secara singkat untuk disampaikan kepada audiens. Hal tersebut sangat berbeda dengan analisis data kuantitatif yang harus dimulai dengan metode statistik, pada analisis data kualitatif tahap awalnya adalah pengklasifikasian, pengelompokkan, pengkategorian, dan peringkasan untuk dimasukkan dalam table data.

1.9.7 Kualitas Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, studi Pustaka, dan informasi pendukung lainnya dari informan yang telah ditentukan berdasarkan pedoman dan kompetensinya dalam memberikan informasi terkait masalah penelitian, terkhususnya para perempuan. Data yang didapatkan dan kemudian dianalisis dengan tepat akan meningkatkan kemampuan peneliti untuk menentukan dan melihat keakuratan data yang dikumpulkan, serta dapat meningkatkan kepercayaan para pembaca atas keakuratan data.

Cresswell (2007) mengempasis strategi-strategi validitas dari suatu penelitian, seperti *triangulasi*, *member checking*, *rich and thick description*, *bias clarification*, dll. Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan strategi validitas *triangulasi* dan *member checking*. Strategi *triangulasi* adalah strategi triangulasi terhadap perbedaan data melalui pemeriksaan *evidence* yang diperoleh dari sumber sebagai dasar melakukan pelabelan atau pengklasifikasian tema-tema di dalam penelitian secara koheren. Sedangkan *member checking* adalah strategi yang dapat digunakan untuk mengetahui akurasi data hasil penelitian. Dalam konteks ini, peneliti merasa bahwa penelitian ini dapat menggunakan kedua strategi tersebut.

1.10 Sistematika Penelitian

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisikan gambaran awal penelitian yang mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ulasan penelitian terdahulu, termasuk konsep partisipasi perempuan, pemberdayaan perempuan, serta tantangan partisipasi perempuan di Kampung Tematik Seni di Jurang Belimbing. Pada bab ini juga memuat tentang teori yang relevan dengan penelitian dan metode yang akan digunakan pada penelitian ini.

Bab II: Gambaran Umum Penelitian

Bab ini akan membahas gambaran umum penelitian yang relevan dengan pertanyaan pada rumusan masalah. Gambaran umum dari penelitian ini, sesuai dengan judul yaitu berisikan tentang keterlibatan perempuan dalam pengembangan kampung tematik khususnya di Jurang Belimbing. Lalu akan membahas juga mengenai dampak keterlibatan perempuan dalam sisi sosial budaya. Pada bab ini juga akan berisikan mengenai pemberdayaan perempuan beserta dampaknya.

Bab III: Temuan dan Analisis Penelitian

Bab III akan membahas bagaimana data dan informasi untuk penelitian dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh sebelumnya dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi akan dianalisis untuk menemukan bagaimana pengelolaan kampung tematik, berfokus kepada keterlibatan perempuan dalam kampung tematik. Terdapat pula analisis data tentang partisipasi perempuan dan tantangannya, pemberdayaan perempuan serta dampaknya untuk perempuan pada kampung tematik.

Bab ini akan menghubungkan hasil penelitian pada Bab II dengan teori yang telah dijelaskan pada Bab I untuk dianalisis jawaban yang ada dari pertanyaan penelitian yang tercantum pada rumusan masalah. Pada bab ini juga membahas hambatan atau tantangan yang ditemukan serta Solusi yang

dapat diterapkan.

Bab IV: Penutup

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penelitian. Pada bab ini akan berisikan ringkasan dari hasil penelitian dan menjelaskan bagaimana temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini juga memberikan rekomendasi untuk kebijakan dan program untuk keterlibatan perempuan, tantangan partisipasi, dan pemberdayaan perempuan, serta usulan untuk penelitian di masa yang akan datang.